BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer dan data sekunder.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula

oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "Oor Logs-Overgangs Blasting" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.

b. Kelompok Non-Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Pada bulan Maret 2006, Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jawa Barat Bagian membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung yaitu terdiri dari :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
4) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78
5) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116

Pada tahun 2009, terdapat 15 KPP dibawahi Kanwil DJP Jawa Barat I :

1) KPP Pratama Ciamis, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 75

2) KPP Pratama Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
3) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
4) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
5) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78
6) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
7) KPP Pratama Purwakarta, Jalan Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder
8) KPP Pratama Sumedang, Jalan Ibrahim Adjie (d/h Jalan Kiara Condong) No. 372
9) KPP Pratama Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya No. 154
10) KPP Pratama Garut, Jalan Pembangunan No. 224
11) KPP Pratama Cimahi, Jalan Raya Barat No. 574 Kotak Pos 112
12) KPP Pratama Majalaya, Jalan Peta No. 7 Lingkar Selatan
13) KPP Pratama Soreang, Jalan Raya cimareme No. 205 Ngamprah, Bandung
14) KPP Pratama Cianjur, Jalan Raya Cianjur-Bandung KM.3
15) KPP Pratama Sukabumi, Jalan RE. Martadinata No.1, Kotak Pos 47

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa

b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.
d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
    a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
    b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
    c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
    d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan kepegawaian,
    b. Melakukan urusan Keuangan,
    c. Melakukan urusan tata usaha,
    d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
   b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
   c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
   d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
   b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
   c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan urusan penetapan,
   b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
   c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
   b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
   c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
   b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
   c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
   d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
   b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
   c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
   d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

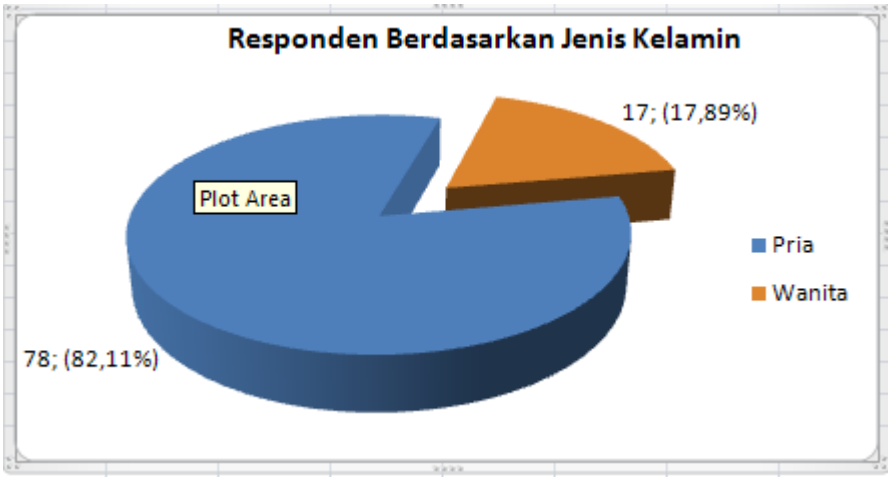
4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 95 responden. Untuk variabel X (Pemeriksaan Pajak) kuesioner diberikan kepada objek yaitu pegawai fungsional. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

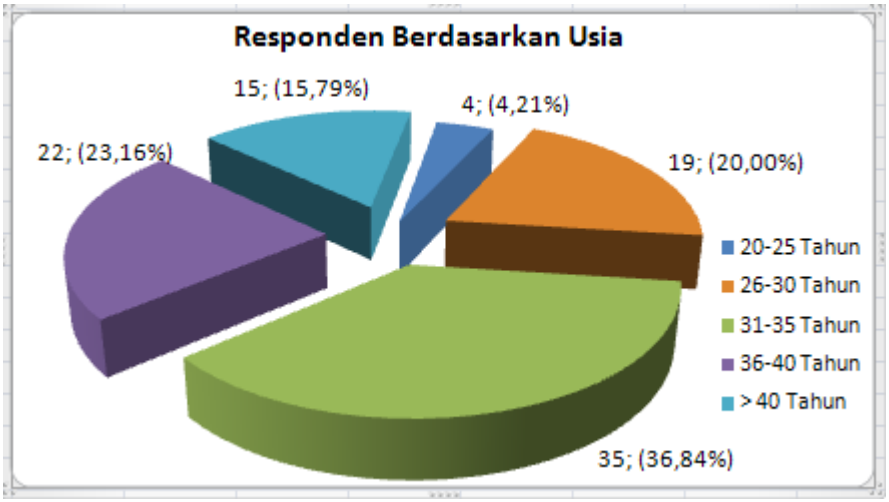


Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria berjumlah 78 orang atau sebesar 82,11% dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 17 orang atau sebesar 17,89%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai fungsional lebih banyak responden pria, dan pada kenyataanya pegawai pria lebih banyak daripada perempuan pada KPP Pratama di Wilayah Bandung. Hal ini dapat dipahami karena pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan langsung ke tempat Wajib Pajak, dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang fleksibel, stamina yang prima dengan beban pekerjaan yang banyak.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

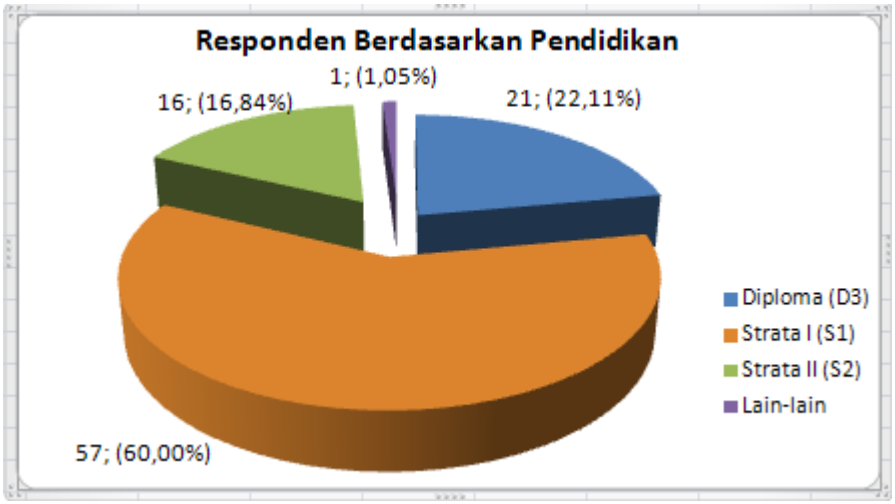


Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 4,21%, 26-30 tahun berjumlah 19 orang atau sebesar 20,00%, 31-35 tahun berjumlah 35 orang atau sebesar 36,84%, 36-40 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 23,16%, dan di atas 40 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 15,79%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai fungsional lebih banyak berumur 31-35 tahun. Hal ini berarti pemeriksa pajak mayoritas terdiri dari usia produktif.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

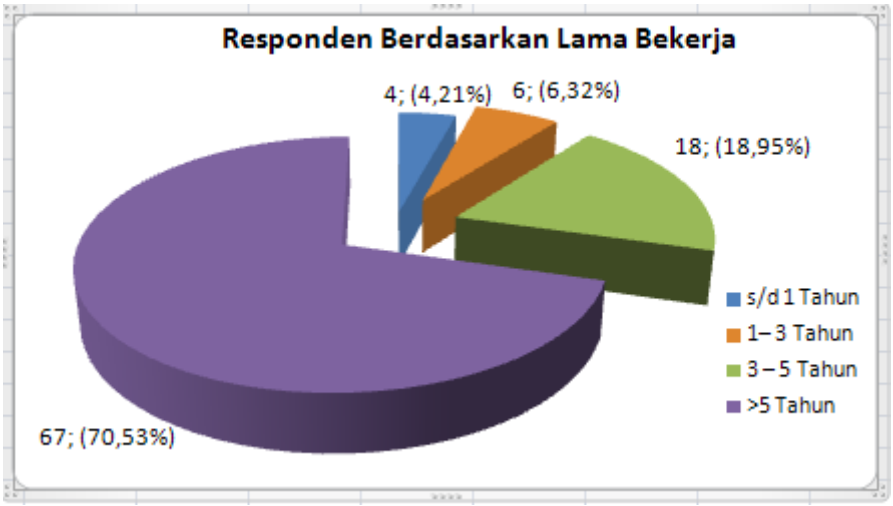


Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3) sebanyak 21 orang atau sebesar 22,11%, responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 57 orang atau sebesar 60,00%, responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 16 orang atau sebesar 16,84%, dan responden dengan pendidikan terakhir Lain-lain sebanyak 1 orang atau sebesar 1,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini berarti pemeriksa pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung merupakan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini:

Gambar 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja



Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja sampai dengan 1 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 4,21%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6,32%, responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 18,95%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 67 orang atau sebesar 70,53%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun. Hal ini berarti pemeriksa pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung sudah memiliki pengalaman bekerja yang sudah lama.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang

sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.3.1.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam upaya menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan pajak terhutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar dan lengkap. Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pemeriksaan pajak diukur menggunakan 18 (delapanbelas) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 37 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

a) Mempelajari Berkas Wajib Pajak

Gambaran mengenai indikator mempelajari berkas wajib pajak dalam pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mempelajari Berkas Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Pengumpulan data internal mengenai berkas wajib pajak	F	12	15	67	0	1	322	475	67,8%
		%	12,6	15,8	70,5	0,0	1,1			
2	Pengumpulan data eksternal mengenai berkas wajib pajak	F	11	14	69	0	1	319	475	67,2%
		%	11,6	14,7	72,6	0,0	1,1			
3	Informasi berkas wajib pajak yang didapat dari data internal dan eksternal	F	15	18	42	18	2	311	475	65,5%
		%	15,8	18,9	44,2	18,9	2,1			
	Total Indikator							**952**	**1425**	**66,8%**

Pada tabel 4.1 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan yang membentuk indikator mempelajari berkas wajib pajak sebesar 66,8% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pengumpulan data baik internal maupun internal digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai wajib pajak. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data dimulai dari kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data internal maupun data eksternal. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data internal mengenai berkas wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang yang dilakukan pemeriksa pajak terhadap pengumpulan data internal mengenai berkas wajib pajak sebesar 67,8% dan termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3 yang menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pengumpulan data internal mengenai berkas wajib pajak cukup. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengumpulan data

internal mengenai berkas wajib pajak masih kurang karena masih adanya sedikit keterbatasan akses.

2. Pengumpulan data eksternal mengenai berkas wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden mengenai pengumpulan data eksternal mengenai berkas wajib pajak sebesar 67,2% dan termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3 yang menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pengumpulan data eksternal mengenai berkas wajib pajak cukup. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengumpulan data eksternal mengenai berkas wajib masih kurang karena dari data internalnyapun cukup mensuport. Karena data eksternal tergantung dari data internal.

3. Informasi berkas wajib pajak yang didapat dari data internal dan eksternal

   Persentase skor tanggapan responden mengenai informasi berkas wajib pajak yang didapat dari data internal dan eksternal sebesar 65,5% dan termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3 yang menunjukkan bahwa informasi berkas wajib pajak yang didapat dari data internal dan eksternal cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal wajib pajak, karena dari data internal dan eksternalpun cukup sehingga informasi yang didapatpun masih dibilang kurang.

b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Gambaran mengenai indikator menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Analisis pada SPT dan laporan keuangan wajib pajak	F	68	23	4	0	0	444	475	93,5%
		%	71,6	24,2	4,2	0,0	0,0			

Pada tabel 4.2 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak sebesar 93,5% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung selalu menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Sementara untuk data non keuangan analisis hanya dilakukan secara kualitatif.

c) Mengidentifikasi Masalah

Gambaran mengenai indikator mengidentifikasi masalah yang mungkin ada pada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mengidentifikasi Masalah

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Mengidentifikasikan masalah	F	64	20	3	8	0	425	475	89,5%
		%	67,4	21,1	3,2	8,4	0,0			

Pada tabel 4.3 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator identifikasi masalah yang ada pada wajib pajak sebesar 89,5% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung selalu melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada pada wajib pajak. Identifikasi masalah dibutuhkan untuk mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Terhadap masalah yang ada pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang teridentifikasi.

d) Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

Gambaran mengenai indikator melakukan pengenalan lokasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	*Tax payer profile* dijadikan media untuk pengenalan lokasi wajib pajak	F	41	50	3	1	0	416	475	87,6%
		%	43,2	52,6	3,2	1,1	0,0			
7	Meninjau lokasi usaha Wajib Pajak	F	83	11	1	0	0	462	475	97,3%
		%	87,4	11,6	1,1	0,0	0,0			
	Total Indikator							**878**	**950**	**92,4%**

Pada tabel 4.4 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator pengenalan lokasi wajib pajak wajib pajak sebesar 92,4% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pengenalan lokasi wajib pajak yang dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah sangat baik. Setelah seluruh data dan informasi yang telah didapat dan dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi wajib pajak. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Tax payer profile* dijadikan media untuk pengenalan lokasi wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang *tax payer profile* sebagai media untuk pengenalan lokasi wajib pajak sebesar 87,6% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 4 yang menunjukkan bahwa pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di

Wilayah Bandung sering menjadikan *tax payer profile* sebagai media untuk pengenalan lokasi wajib pajak.

2. Meninjau lokasi usaha Wajib Pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang peninjauan lokasi usaha wajib pajak sebesar 97,3% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung selalu melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha wajib pajak.

e) Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Gambaran mengenai indikator penentuan ruang lingkup pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	F	69	25	1	0	0	448	475	94,3%
		%	72,6	26,3	1,1	0,0	0,0			
9	Setelah menentukan pos-pos yang berkaitan dengan masalah yang ada	F	78	17	0	0	0	458	475	96,4%
		%	82,1	17,9	0,0	0,0	0,0			
	Total Indikator							**906**	**950**	**95,4%**

Pada tabel 4.5 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator penentuan ruang lingkup pemeriksaan sebesar 95,4% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya

penentuan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah sangat baik. Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

   Persentase skor tanggapan responden tentang penentuan ruang lingkup pemeriksaan sebesar 94,3% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung selalu menetukan ruang lingkup pemeriksaan.

2. Langkah berikutnya yang dilakukan setelah menentukan pos-pos yang berkaitan dengan masalah yang ada

   Persentase skor tanggapan responden tentang langkah berikutnya yang dilakukan yang dilakukan setelah menentukan pos-pos yang berkaitan dengan masalah yang ada sebesar 96,4% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung melakukan pendalaman lebih jauh setelah menentukan pos-pos yang berkaitan dengan masalah yang ada.

f) Menyusun Program Pemeriksaan

Gambaran mengenai indikator penyusunan program pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyusun Program Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
10	Program pemeriksaan tidak disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan pada tahap persiapan	F	28	19	26	22	0	338	475	71,2%
		%	29,5	20,0	27,4	23,2	0,0			
11	Program pemeriksaan tidak merujuk kepada identifikasi permasalahan serta ruang lingkup yang telah dilakukan	F	28	22	24	21	0	342	475	72,0%
		%	29,5	23,2	25,3	22,1	0,0			
	Total							**680**	**950**	**71,6%**

Pada tabel 4.6 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator penyusunan program pemeriksaan sebesar 71,2% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya penyusunan program pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah baik. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya dan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serrta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan pada tahap persiapan

Persentase skor tanggapan responden tentang pemeriksaan yang disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan pada tahap persiapan sebesar 71,2% dan termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung program pemeriksaan telah disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan pada tahap persiapan.

2. Program pemeriksaan merujuk kepada identifikasi permasalahan serta ruang lingkup yang telah dilakukan

   Persentase skor tanggapan responden tentang pemeriksaan yang merujuk kepada identifikasi permasalahan serta ruang lingkup yang telah dilakukan sebesar 72,0% dan termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung program pemeriksaan telah merujuk kepada identifikasi permasalahan serta ruang lingkup yang telah dilakukan.

g) Menentukan Buku-Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam

Gambaran mengenai indikator penentuan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menentukan Buku-Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
12	Menentukan buku-buku atau catatan-catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak	F	38	54	2	1	0	414	475	87,2%
		%	40,0	56,8	2,1	1,1	0,0			

Pada tabel 4.7 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator penentuan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak sebesar 87,2% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung selalu menentukan buku-buku atau catatan-catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak. Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak.

h) Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Gambaran mengenai indikator menyediakan sarana pemeriksaan terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyediakan Sarana Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
13	Sarana dalam pemeriksaan	F	14	23	38	9	11	305	475	64,2%
		%	14,7	24,2	40,0	9,5	11,6			

Pada tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator penyediaan sarana pemeriksaan sebesar 64,2% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung cukup disediakan sarana dalam pemeriksaan.

Artinya masih ada sebagian yang belum lengkapnya sarana dalam pemeriksaan yang harus dipersiapkan. Sebaiknya menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

i) Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

Gambaran mengenai indikator pemeriksaan ditempat wajib pajak terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
14	Meminjam seluruh buku/dokumen/catatan wajib pajak	F	25	23	9	22	16	304	475	64,0%
		%	26,3	24,2	9,5	23,2	16,8			
15	Peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada wajib pajak	F	40	6	8	13	28	302	475	63,6%
		%	42,1	6,3	8,4	13,7	29,5			
	Total							**606**	**950**	**63,8%**

Pada tabel 4.9 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator pemeriksaan ditempat wajib pajak sebesar 63,8% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya pemeriksaan ditempat wajib pajak yang dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dilakukan salah satunya untuk peminjaman buku, catatan, atau dokumen wajib pajak. Pemeriksaan di tempat wajib pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha

wajib pajak. Salah satunya adalah melakukan peminjaman buku, catatan, atau dokumen wajib pajak. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Meminjam seluruh buku/dokumen/catatan wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang pemeriksaan lokasi wajib pajak sebesar 64,0% dan termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pada peminjaman buku/dokumen/catatan wajib pajak pemeriksan tidak meminjam seluruhnya, tetapi hanya buku/dokumen/catatan wajib pajak yang benar-benar diperlukan.

2. Peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang peminjaman seluruh buku/dokumen/catatan wajib pajak sebesar 63,6% dan termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa meminjam buku/dokumen/catatan wajib pajak sangat mudah. Walaupun sebagian responden menjawab sangat mudahnya peminjaman buku, catatan, atau dokumen kepada wajib pajak, tetapi masih ada sebagian responden menjawab sulitnya peminjaman buku, catatan, atau dokumen kepada wajib pajak sebesar 29,5%. Jika dilihat dari hasil jumlah keseluruhan pertanyaan mempunyai skor sebesar 63,6% yang termasuk dalam kategori cukup dan sebagian responden menjawab sangat sulit dalam hal peminjaman buku, catatan, atau dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa

masih adanya kesulitan dalam peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak.

j) Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

Gambaran mengenai penilaian atas sistem pengendalian intern wajib pajak terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
16	Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Wajib Pajak	F	72	7	15	1	0	435	475	91,6%
		%	75,8	7,4	15,8	1,1	0,0			
17	Mengidentifikasi dan menganalisa resiko	F	56	24	15	0	0	421	475	88,6%
		%	58,9	25,3	15,8	0,0	0,0			
18	Pentingnya penilaian akhir atas Sistem Pengendalian Intern	F	62	18	15	0	0	427	475	89,9%
		%	65,3	18,9	15,8	0,0	0,0			
	Total							**1283**	**1425**	**90,0%**

Pada tabel 4.10 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan yang membentuk indikator penilaian atas sistem pengendalian intern wajib pajak sebesar 90,0% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya penilaian atas sistem pengendalian intern wajib pajak yang dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah sangat baik. Penilaian atas sistem pengendalian intern meliputi pengumpulan data/informasi, penelaahan, penilaian sementara terhadap Sistem Pengendalian Intern, pengujian, serta penilaian akhir dari Sistem Pengendalian

Intern. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Wajib Pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Wajib Pajak sebesar 91,6% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Wajib Pajak dilakukan untuk mengetahui lemah /kuatnya sistem pengendalian intern Wajib Pajak.

2. Mengidentifikasi dan menganalisa resiko

   Persentase skor tanggapan responden tentang identifikasi dan analisa resiko sebesar 88,6% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa identifikasi dan analisa resiko sangat penting karena merupakan bagian utama dari pengendalian inten.

3. Pentingnya penilaian akhir atas Sistem Pengendalian Intern

   Persentase skor tanggapan responden tentang pentingnya penilaian akhir atas Sistem Pengendalian Intern wajib pajak sebesar 89,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa penilaian akhir atas Sistem Pengendalian Intern wajib

pajak bermanfaat sebagai bahan pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

k) Memutahirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

Gambaran mengenai pemutahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memutahirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
19	Pemutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	F	49	21	10	15	0	389	475	81,9%
		%	51,6	22,1	10,5	15,8	0,0			

Pada tabel 4.11dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator pemutahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan sebesar 81,9% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pemutahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah baik. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian sistem pengendalian internal wajib pajak.

l) Melakukan Pemeriksaan Atas Buku-Buku, Catatan-Catatan, dan Dokumen-Dokumen

Gambaran mengenai pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen wajib pajak terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Pemeriksaan Atas Buku-Buku, Catatan-Catatan, dan Dokumen-Dokumen

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
20	Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen	F	76	19	0	0	0	456	475	96,0%
		%	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0			
21	Pedoman pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen	F	90	5	0	0	0	470	475	98,9%
		%	94,7	5,3	0,0	0,0	0,0			
22	Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan buku, catatan dan dokumen wajib pajak	F	91	3	0	1	0	469	475	98,7%
		%	95,8	3,2	0,0	1,1	0,0			
	Total Indikator							**1395**	**1425**	**97,9%**

Pada tabel 4.12 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan yang membentuk indikator pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen wajib pajak sebesar 97,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen wajib pajak yang dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah sesuai prosedur. Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen

   Persentase skor tanggapan responden tentang pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak sebesar 96,0% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling

banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak selalu dilakukan.

2. Pedoman pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen

   Persentase skor tanggapan responden tentang pedoman pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak sebesar 98,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak telah berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan.

3. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan buku, catatan dan dokumen wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang teknik yang digunakan dalam pemeriksaan buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak sebesar 98,7% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa teknik yang digunakan dalam pemeriksaan buku, catatan dan dokumen wajib pajak adalah evaluasi, analisis, rekonsiliasi fiskal, mengecek data dan konfirmasi.

m) Melakukan Konfirmasi Pada Pihak Ketiga

Gambaran mengenai melakukan konfirmasi pada pihak ketiga terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Konfirmasi Pada Pihak Ketiga

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
23	Pentingnya melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	F	90	3	2	0	0	468	475	98,5%
		%	94,7	3,2	2,1	0,0	0,0			
24	Konfirmasi kepada pihak ketiga	F	42	35	0	18	0	386	475	81,3%
		%	44,2	36,8	0,0	18,9	0,0			
	Total Indikator							**854**	**950**	**89,9%**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator melakukan konfirmasi pada pihak ketiga sebesar 89,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya konfirmasi pada pihak ketiga sering dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Konfirmasi pada pihak ketiga merupakan penegasan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pentingnya melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

   Persentase skor tanggapan responden tentang pentingnya melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar 89,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga penting untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari wajib pajak.

2. Konfirmasi kepada pihak ketiga

Persentase skor tanggapan responden tentang konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar 81,3% dan termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa konfirmasi kepada pihak ketiga sering dilakukan.

n) Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

Gambaran mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
25	Pemeriksa tidak perlu memberitahukan koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak	F	51	37	7	0	0	424	475	89,3%
		%	53,7	38,9	7,4	0,0	0,0			
26	Pemeriksa tidak perlu melakukan pembahasan atas temuan dengan wajib pajak	F	50	37	8	0	0	422	475	88,8%
		%	52,6	38,9	8,4	0,0	0,0			
27	Wajib pajak tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan dan pendapat atas koreksi fiskal yang telah dilakukan	F	51	44	0	0	0	431	475	90,7%
		%	53,7	46,3	0,0	0,0	0,0			
	Total Indikator							**1277**	**1425**	**89,6%**

Pada tabel 4.14 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pernyataan yang membentuk indikator pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebesar 89,6% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sudah

dilakukan pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dengan sangat baik. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemeriksa perlu memberitahukan koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang perlunya memberitahukan koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak sebesar 89,3% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa memberitahukan koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak sangat perlu dilakukan.

2. Pemeriksa perlu melakukan pembahasan atas temuan dengan wajib pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang perlunya melakukan pembahasan atas temuan dengan wajib pajak sebesar 88,8% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa melakukan pembahasan atas temuan dengan wajib pajak sangat perlu dilakukan.

3. Kesempatan Wajib Pajak untuk menyampaikan sanggahan dan pendapat atas koreksi fiskal yang telah dilakukan

   Persentase skor tanggapan responden tentang kesempatan Wajib Pajak untuk menyampaikan sanggahan dan pendapat atas koreksi fiskal yang telah

dilakukan sebesar 90,7% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sangat perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan dan pendapat atas koreksi fiskal yang telah dilakukan.

o) Melakukan Sidang Penutup

Gambaran mengenai pelaksanaan sidang penutup terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Sidang Penutup

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
28	Pentingnya melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan	F	50	33	4	8	0	410	475	86,3%
		%	52,6	34,7	4,2	8,4	0,0			

Pada tabel 4.15 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator pelaksanaan sidang penutup sebesar 86,3% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pelaksanaan sidang penutup pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah dilaksanakan baik. Tujuan dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib apajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

p) Kertas Kerja Pemeriksaan

Gambaran mengenai kertas kerja pemeriksaan terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kertas Kerja Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
29	Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksa	F	12	32	41	9	1	330	475	69,5%
		%	12,6	33,7	43,2	9,5	1,1			
30	Tidak ada format Kertas Kerja Pemeriksa dalam bentuk yang baku dan seragam	F	8	11	51	23	2	285	475	60,0%
		%	8,4	11,6	53,7	24,2	2,1			
	Total Indikator							**615**	**950**	**64,7%**

Pada tabel 4.16 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator kertas kerja pemeriksaan sebesar 64,7% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung menyusun KKP berdasarkan fungsinya. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksa

   Persentase skor tanggapan responden tentang penyusunan Kertas Kerja Pemeriksa sebesar 69,5% dan termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3 yang menunjukkan bahwa penyusunan Kertas Kerja Pemeriksa disusun berdasarkan fungsinya.

2. Tidak ada format Kertas Kerja Pemeriksa dalam bentuk yang baku dan seragam

   Persentase skor tanggapan responden tentang tidak ada format Kertas Kerja Pemeriksa dalam bentuk yang baku dan seragam 60,0% dan termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3 yang menunjukkan bahwa pemeriksa cukup setuju dengan tidak ada format KKP dalam bentuk yang baku dan seragam.

q) Laporan Hasil Pemeriksaan

Gambaran mengenai laporan hasil pemeriksaan terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Laporan Hasil Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
31	Laporan Pemeriksaan Pajak	F	90	4	1	0	0	469	475	98,7%
		%	94,7	4,2	1,1	0,0	0,0			
32	Laporan Pemeriksaan Pajak tidak memuat keterangan-keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, penugasan dan alasan pemeriksaan, serta daftar lampiran	F	58	37	0	0	0	438	475	92,2%
		%	61,1	38,9	0,0	0,0	0,0			
33	Laporan memuat penjelasan lengkap pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa, serta temuan pemeriksa	F	55	39	0	1	0	433	475	91,2%
		%	57,9	41,1	0,0	1,1	0,0			
34	Hasil pemeriksaan merupakan ikhtisar yang tidak menggambarkan perbandingan antara SPT dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang	F	54	41	0	0	0	434	475	91,4%
		%	56,8	43,2	0,0	0,0	0,0			

35	Laporan Pemeriksaan Pajak dijadikan dasar untuk penerbitan SKP	F	53	42	0	0	0	433	475	91,2%
		%	55,8	44,2	0,0	0,0	0,0			
	Total Indikator							**2207**	**2375**	**92,9%**

Pada tabel 4.17 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kelima butir pernyataan yang membentuk indikator laporan hasil pemeriksaan sebesar 92,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya laporan hasil pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Laporan Pemeriksaan Pajak

   Persentase skor tanggapan responden tentang laporan pemeriksaan pajak sebesar 98,7% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa laporan Pemeriksaan Pajak telah memuat semua keterangan mengenai hasil pemeriksaan dan data wajib pajak.

2. Laporan Pemeriksaan Pajak memuat keterangan-keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, penugasan dan alasan pemeriksaan, serta daftar lampiran

   Persentase skor tanggapan responden tentang laporan pemeriksaan pajak memuat keterangan-keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, penugasan dan alasan pemeriksaan, serta daftar lampiran sebesar 92,2% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi

skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa laporan Pemeriksaan Pajak telah memuat keterangan-keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, penugasan dan alasan pemeriksaan, serta daftar lampiran.

3. Laporan memuat penjelasan lengkap pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa, serta temuan pemeriksa

   Persentase skor tanggapan responden tentang laporan pemeriksaan pajak memuat penjelasan lengkap pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa, serta temuan pemeriksa sebesar 91,2% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa laporan Pemeriksaan Pajak telah memuat penjelasan lengkap pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa, serta temuan pemeriksa.

4. Hasil pemeriksaan merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara SPT dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

   Persentase skor tanggapan responden tentang hasil pemeriksaan merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara SPT dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang sebesar 91,4 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa pemeriksaan merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara SPT dengan hasil

pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

5. Laporan Pemeriksaan Pajak dijadikan dasar untuk penerbitan SKP

   Persentase skor tanggapan responden tentang laporan Pemeriksaan Pajak dijadikan dasar untuk penerbitan SKP sebesar 91,2 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa laporan pemeriksaan pajak telah dijadikan dasar untuk penerbitan SKP.

r) Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

Gambaran mengenai kesimpulan dan usul pemeriksaan terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
36	Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan memuat hasil pemeriksaan	F	76	14	5	0	0	451	475	94,9%
		%	80,0	14,7	5,3	0,0	0,0			
37	Isi dari usulan pemeriksa	F	91	0	4	0	0	467	475	98,3%
		%	95,8	0,0	4,2	0,0	0,0			
	Total Indikator							**918**	**950**	**96,6%**

Pada tabel 4.18 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk kesimpulan dan usul pemeriksaan sebesar 96,6% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya kesimpulan dan usul pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah

sangat baik. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesimpulan dan usul pemeriksaan memuat hasil pemeriksaan

   Persentase skor tanggapan responden tentang kesimpulan dan usul pemeriksaan memuat hasil pemeriksaan sebesar 94,9% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa kesimpulan dan usul pemeriksaan memuat hasil pemeriksaan.

2. Isi dari usulan pemeriksa

   Persentase skor tanggapan responden tentang isi dari usulan pemeriksa sebesar 98,3% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya bila dilihat dari distribusi skor tanggapan responden, paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 5 yang menunjukkan bahwa isi dari usulan pemeriksa menyangkut masalah ketetapan yang diusulkan untuk diterbitkan atau hasil akhir pemeriksaan untuk menuju proses berikutnya.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel pemeriksaan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kedelapan belas indikator yang membentuk variabel pemeriksaan pajak.

Tabel 4.19
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pemeriksaan Pajak

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Pemeriksaan Pajak	F	1941	846	475	191	62	**14958**	**17575**	**85,1%**
	%	55,2	24,1	13,5	5,4	1,8			

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator pemeriksaan pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{14958}{17575} \text{ X } 100\% = 85{,}1\%$$

Melalui tabel 4.19 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 85,1% termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, pada umumnya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan pajak secara menyeluruh di Wilayah Bandung dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas delapan belas indikator dan hasilnya ditangkum pada table 4.19 berikut ini:

Tabel 4.20
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

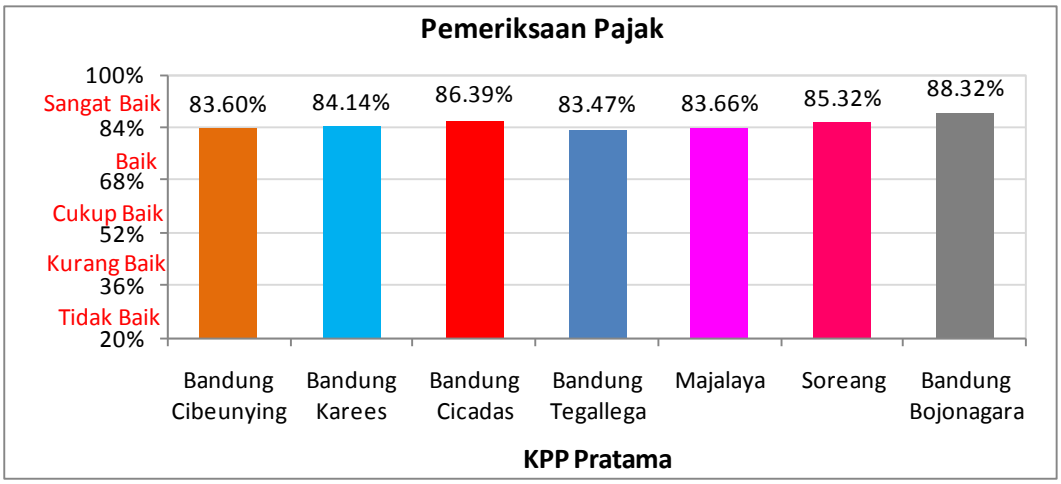
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Mempelajari berkas wajib pajak	952	1425	66,8%	Cukup
2.	Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak	444	475	93,5%	Sangat Baik
3.	Mengidentifikasi masalah	425	475	89,5%	Sangat Baik
4.	Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak	878	950	92,4%	Sangat Baik
5.	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	906	950	95,4%	Sangat Baik
6	Menyusun program pemeriksaan	680	950	71,6%	Baik
7	Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam	414	475	87,2%	Sangat Baik
8	Menyediakan sarana pemeriksaan	305	475	64,2%	Cukup
9	Memeriksa di tempat Wajib Pajak,	606	950	63,8%	Cukup
10	Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern	1283	1425	90,0%	Sangat Baik
11	Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	389	475	81,9%	Baik
12	Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen	1395	1425	97,9%	Sangat Baik
13	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,	854	950	89,9%	Sangat Baik
14	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak	1277	1425	89,6%	Sangat Baik
15	Melakukan sidang penutup	410	475	86,3%	Sangat Baik
16	Kertas Kerja Pemeriksaan	615	950	64,7%	Cukup
17	Laporan Hasil pemeriksaan	2207	2375	92,9%	Sangat Baik
18	Kesimpulan dan usul pemeriksaan	918	950	96,6%	Sangat Baik
	Total	**14958**	**17575**	**85,1%**	**Sangat Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dikatakan sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Bandung telah mengikuti prosedur dan melakukan semua tahapan - tahapan pelaksanaan dengan baik. Sehingga dengan tahapan persiapan yang telah dilakukan dengan baik dan tahapan pelaksanaan juga telah dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan lancar dan akan mencapai tujuan utama dari pemeriksaan yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu, bahwa suatu

pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perecanaan atau persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajak berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Dengan demikian petugas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak dengan sangat baik.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran pemeriksaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.5
Hasil Kategorisasi Pemeriksaan Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung

Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, pemeriksaan pajak pada KPP Bandung Bojonagara merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori

sangat baik, sebaliknya pemeriksaan pajak pada KPP Bandung Tegallega dan Bandung Cibeunying merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori baik.

4.3.1.2 Analisis Deskriptif Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

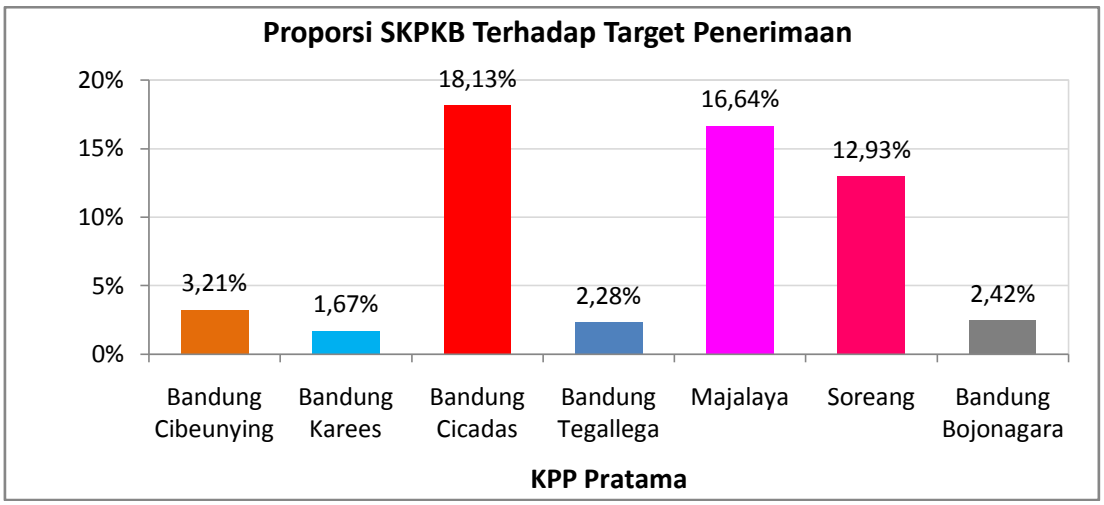
Kepatuhan material wajib pajak diukur melalui proporsi pajak terutang kurang bayar terhadap target penerimaan pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berikut gambaran kepatuhan material wajib pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Tabel 4.21
Kepatuhan Material Wajib Pajak

No.	KPP Pratama	SKPKB	Target Penerimaan	%
1	Cibeunying	22,344,988,720	696,946,000,000	3,21%
2	Karees	11,508,730,678	687,321,000,000	1,67%
3	Cicadas	65,986,730,705	363,895,000,000	18,13%
4	Tegalega	7,049,389,278	309,476,000,000	2,28%
5	Majalaya	21,860,361,700	131,403,000,000	16,64%
6	Soreang	39,042,479,804	301,957,000,000	12,93%
7	Bojonagara	7,644,316,280	316,254,000,000	2,42%
	Rata-Rata			**8,18%**

Melalui tabel 4.20 dapat diketahui seberapa besar sumbangsih SKPKB terhadap penerimaan pajak tiap-tiap KPP. Dari tabel di atas pula menggambarkan kepatuhan material wajib pajak paling tinggi di KPP Bandung Karees, kemudian di KPP Bandung Tegallega. Sebaliknya kepatuhan material wajib pajak paling rendah di KPP Bandung Cicadas dan KPP Majalaya. Secara keseluruhan

kepatuhan material wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung yang dilihat dari proporsi SKPKB terhadap target penerimaan pajak terbilang sangat kecil. Hal itu dikarenakan jumlah proporsi SKPKB terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 8,18%. Selain itu, target penerimaan pajak tidak hanya dititikberatkan pada jumlah nominal yang tertera dalam SKPKB, misalnya sanksi bunga, sanksi administrasi dan penerimaan pajak lainnya yang memiliki kontribusi langsung terhadap target penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran kepatuhan material wajib pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.6
Hasil Kategorisasi Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung

Kepatuhan material wajib pajak dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Dengan diterbitkannya SKPKB menunjukkan bahwa belum sesuainya jumlah kewajiban pajak yang

harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya oleh wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak secara material.

4.3.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

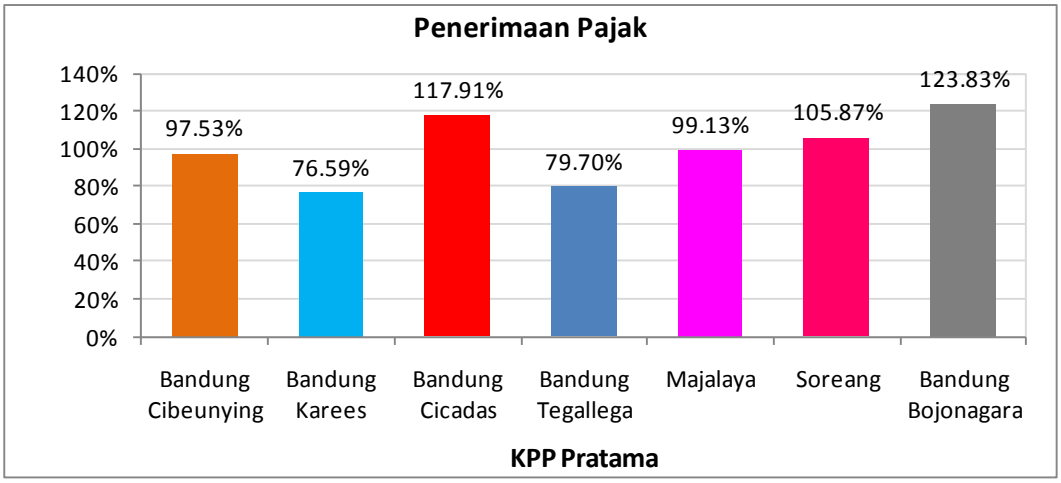
Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Penerimaan pajak diproksi dari rasio realisasi penerimaan terhadap target penerimaan. Berikut gambara penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Tabel 4.22
Penerimaan Pajak

No.	KPP Pratama	Realisasi	Target	Pencapaian
1	Cibeunying	679,747,000,000	696,946,000,000	97,53%
2	Karees	526,389,000,000	687,321,000,000	76,59%
3	Cicadas	429,074,000,000	363,895,000,000	117,91%
4	Tegalega	246,642,000,000	309,476,000,000	79,70%
5	Majalaya	130,262,000,000	131,403,000,000	99,13%
6	Soreang	319,692,000,000	301,957,000,000	105,87%
7	Bojonagara	391,607,000,000	316,254,000,000	123,83%
	Rata-Rata			**100,08%**

Melalui tabel 4.21 dapat diketahui penerimaan pajak tiap-tiap KPP. Dari data di atas terlihat ada beberapa KPP Pratama di Wilayah Bandung yang tidak mencapai target, yaitu KPP Cibeunying dengan pencapaian 97,53%, KPP Karees dengan pencapaian 76,59%, KPP Tegalega dengan pencapaian 79, 70%, dan KPP Majalaya dengan pencapaian 99,13%. Penerimaan pajak untuk di KPP Bandung Bojonagara merupakan yang paling efektif, kemudian di KPP Bandung Cicadas dan KPP Majalaya. Sebaliknya penerimaan pajak di KPP Bandung Karees

merupakan yang paling tidak efektif, disusul di KPP Bandung Tegallega. Secara keseluruhan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sudah tinggi, hal ini bisa dilihat dari rata-rata pencapaian target penerimaan pajak mencapai 100,08 persen. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

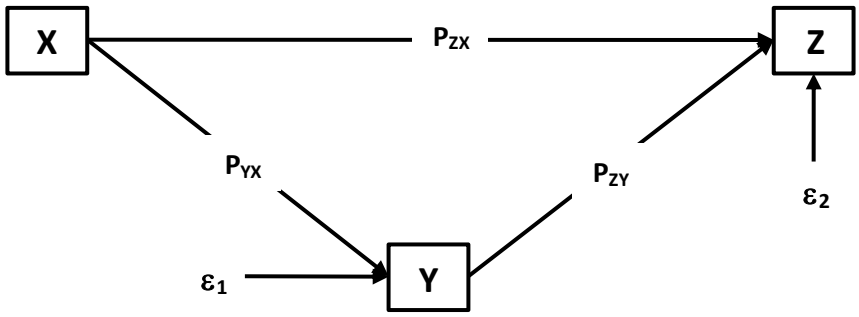


Gambar 4.7
Hasil Kategorisasi Penerimaan Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung

4.4 Analisis Verifikatif (Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak)

Semakin baik pemeriksaan pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak diharapkan juga akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

kepatuhan material Wajib Pajak, kemudian pada tahan kedua akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.8 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$$

Keterangan:
Z = Penerimaan pajak
Y = Kepatuhan material Wajib Pajak
X = Pemeriksaan pajak
$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak
$\mathbf{P_{ZX}}$ = Koefisien jalur Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak
ε = Pengaruh faktor lain

Dari Persamaan jalur sub struktur pertama menggambarkan bahwa kepatuhan material wajib pajak sama dengan koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak ditambah dengan faktor lain yang

mempengaruhi kepatuhan material wajib pajak. Sedangkan persamaan jalur sub struktur kedua menggambarkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak ditambah koefisien jalur kepatuhan material wajib pajak terhadap penerimaan pajak ditambah dengan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan material wajib pajak dan penerimaan pajak.

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel pemeriksaan pajak (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputerisasi analisis jalur menggunakan bantuan software SPSS 18.0 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut.

Tabel 4.23
Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009; 250

. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 18.0 diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.24
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1.000	.882	.439
	X	.882	1.000	.373
	Y	.439	.373	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.004	.162
	X	.004	.	.205
	Y	.162	.205	.
N	Z	7	7	7
	X	7	7	7
	Y	7	7	7

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak (X) dangan kepatuhan material Wajib Pajak (Y) sebesar 0,373 dan masuk dalam kategori lemah atau rendah. Arah hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan material Wajib Pajak menujukkan bahwa pemeriksaan pajak yang baik cenderung diikuti dengan peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak. Kemudian hubungan antara pemeriksaan pajak (X) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,882 termasuk dalam kategori sangat kuat, demikian juga hubungan antara kepatuhan material Wajib Pajak (Y) dengan

penerimaan pajak (Z) sebesar 0,439 termasuk dalam kategori cukup kuat dengan arah positif.

4.4.1 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel pemeriksaan pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan kepatuhan material Wajib Pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (pemeriksaan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$$\left(\mathrm{P_{YX}}\right) = r_{XY} = \left(0,373\right)$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 18.0 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak sebagai berikut.

Tabel 4.25
Koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-63.993	80.404		-.796	.462
	X	24.579	27.364	.373	.898	.410

a. Dependent Variable: Y

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,373 pada tabel 4.25 merupakan nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak.

Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{Y1} = \left(P_{YX}\right)^2 = \left(0{,}373\right)^2$$
$$= 0{,}139$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 18.0 diperoleh koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak sebagai berikut.

Tabel 4.26
Koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.373[a]	.139	-.033	7.518473

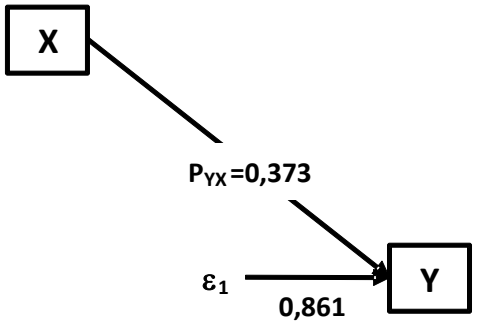
a. Predictors: (Constant), X

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 13,9% terhadap kepatuhan material Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, sementara sisanya sebesar 86,1% merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel yang sedang diteliti, diantaranya sanksi, tarif pajak, dan penghasilan (Akuntabilitas, Vol. 6, No. 2).

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 18.0 For Windows*, hasilnya adalah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan teori yang menyataka bahwa :

> "Tujuan yang terutama dari pemeriksaan adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak".

Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



Gambar 4.9 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

$H_o : \rho_{YX} = 0$ Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak.

$H_a : \rho_{YX} \neq 0$ Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka Ho diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.25 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap terhadap kepatuhan material Wajib Pajak sebesar 0,373. Karena koefisien jalur pemeriksaan pajak (0,373) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung**.**

4.4.2 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah pemeriksaan pajak (X) dan kepatuhan material Wajib Pajak (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}373 \\ 0{,}373 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara pemeriksaan pajak (X) dengan kepatuhan material Wajib Pajak (Y).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}161 & -0{,}433 \\ -0{,}433 & 1{,}161 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak) dengan penerimaan pajak.

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} Z \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}882 \\ 0{,}439 \end{bmatrix} \end{array}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel akibat.

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}161 & -0{,}433 \\ -0{,}433 & 1{,}161 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0{,}882 \\ 0{,}439 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}834 \\ 0{,}128 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,834 dan koefisien jalur variabel kepatuhan material Wajib Pajak sebesar 0,128.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 18.0 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.27
Koefisien jalur pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-289.957	112.603		-2.575	.062
	X	131.969	38.908	.834	3.392	.027
	Y	.308	.590	.128	.522	.629

a. Dependent Variable: Z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,834 dan 0,128 pada tabel 4.27 merupakan nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.

5) Menghitung Koefisien Determinasi.

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi atau pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan penerimaan pajak.

$$R^2_{Z(XY)} = \begin{bmatrix} 0{,}834 & 0{,}128 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}886 \\ 0{,}439 \end{bmatrix}$$

$$= 0{,}792$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 18.0 diperoleh koefisien determinasi pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebagai berikut.

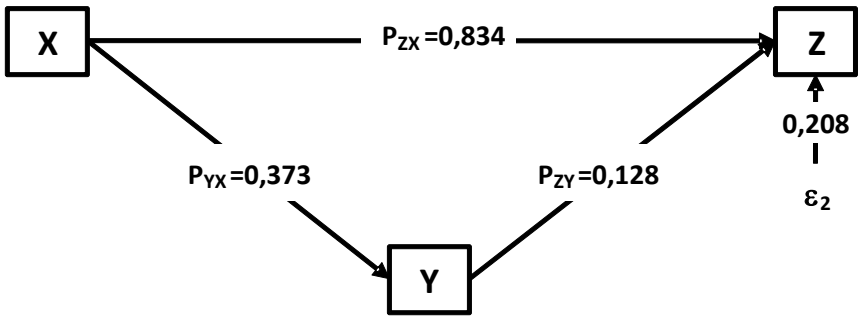
Tabel 4.28
Koefisien determinasi pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890[a]	.792	.688	9.919733

a. Predictors: (Constant), Y, X

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 79,2% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Sisanya sebesar 20,8% merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel yang sedang diteliti, diantaranya Produk Domestik Bruto, dan Jumlah Wajib Pajak (Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2). Secara visual jalur dari variabel independen terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.10 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak sebagai berikut.

Besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

- Pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak = $(P_{ZX})^2$ = (0,834) x (0,834) = 0,696 **(69,6%).**
- Pengaruh tidak langsung pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak = P_{ZX} x r_{XY} x P_{ZY} = (0,834) x (0,373) x (0,128) = 0,040 **(4,0%)**

Jadi total pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung **= 69,6% + 4,0% = 73,6%** dengan arah positif. Artinya pemeriksaan pajak yang baik cenderung meningkatkan penerimaan pajak.

Besar pengaruh kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

- Pengaruh langsung kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak = $(P_{ZY})^2$ = (0,128) x (0,128) = 0,016 **(1,6%)**
- Pengaruh tidak langsung kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak = P_{ZY} x r_{XY} x P_{ZX} = (0,128) x (0,373) x (0,834) = 0,040 **(4,0%).**

Jadi total pengaruh kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung **= 1,6% +**

4,0% = 5,6% dengan arah positif. Artinya kepatuhan material Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak.

6) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Pada pengujian parsial, apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka Ho diterima. Pada pengujian simultan apabila terdapat nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

- Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{ZX} = \rho_{ZY} = 0$ Pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan pajak .

Ha: $\rho_{ZX} \neq \rho_{ZY} \neq 0$ Pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap

Penerimaan pajak .

Dari hasil pengolahan data seperti pada tabel 4.27 dapat dilihat bahwa koefisien jalur dari kedua variabel bebas terhadap penerimaan pajak (yaitu 0,834 dan 0,128) lebih besar dari nol. Oleh karena koefisien jalur dari kedua variabel bebas lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung**.**

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sebesar 79,2%, sedangkan sisanya sebesar 20,8% merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel yang sedang diteliti.

- Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial.

Selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas apakah kedua variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak dan kepatuhan material Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

a) Pengaruh Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZX} = 0$ Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZX} \neq 0$: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.27 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,834. Karena nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak (0,834) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung**.** Dengan semakin baik pemeriksaan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

b) Pengaruh Kepatuhan material Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Kepatuhan material Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$: Kepatuhan material Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.27 diperoleh koefisien jalur kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,128. Karena nilai koefisien jalur kepatuhan material Wajib Pajak (0,128) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa kepatuhan material Wajib Pajak berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung**.** Dengan semakin tinggi kepatuhan material Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.